

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, RAS, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2017, *Sanksi perdata dan Administrati Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta.
- J.C.S. Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum, Aksara Baru*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lexy J. Moeleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kansil dan Cristine S.T, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Riant Nugroho dan Ricky Siahaan, 2006, *BUMN Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi edisi Revisi Cetakan ke-2*, Total Media, Yogyakarta.

Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, UI Press, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 2000, *Kamus Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran

Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 Tahun 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

ARTIKEL JURNAL

Sulistiyandri, *Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 2, 2012.

Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Pengalaman Di Negara Lain*, Jurnal Akutansi Unesa, Vol. 1, 2008.

Zulkarnain Sitompul, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari perspektif Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September 2002.

ONLINE INFORMATION VIA INTERNET

Hukumonline.com, *Apa Sanksinya Jika RUPS Tahunan Terlambat Dilaksanakan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika-rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan-/>, diakses 5 Februari 2021.

Indonesiacarterminal.co.id, *Tentang Kami PT Indonesia Kendaraan Terminal*, <https://indonesiacarterminal.co.id/old/id/>, diakses 4 Februari 2021.

Media.neliti.com, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, www.medianeliti.com, diakses 1 Desember 2020.

OJK.go.id, *Tujuan Pembentukan OJK*, <http://www.ojk.go.id>, diakses 1 Desember 2020.

